



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 5 Januari 2022/Periodik - 2021)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
UNIT KERJA : DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA

I. DATA PRIBADI

1. Nama : **SULISTYO**
2. Jabatan : **SEKRETARIS**
3. NHK : **214755**

II. DATA HARTA**A. TANAH DAN BANGUNAN** **Rp. 1.545.000.000**

1. Tanah dan Bangunan Seluas 65 m2/65 m2 di KAB / KOTA SEMARANG, HASIL SENDIRI Rp. 275.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 65 m2/130 m2 di KAB / KOTA SEMARANG, HASIL SENDIRI Rp. 325.000.000
3. Tanah dan Bangunan Seluas 65 m2/41 m2 di KAB / KOTA SEMARANG, HASIL SENDIRI Rp. 250.000.000
4. Tanah Seluas 373 m2 di KAB / KOTA KENDAL, HASIL SENDIRI Rp. 75.000.000
5. Tanah Seluas 232 m2 di KAB / KOTA KENDAL, HASIL SENDIRI Rp. 70.000.000
6. Tanah Seluas 238 m2 di KAB / KOTA KENDAL, HASIL SENDIRI Rp. 150.000.000
7. Tanah Seluas 2718 m2 di KAB / KOTA KENDAL, HASIL SENDIRI Rp. 400.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN **Rp. 179.500.000**

1. MOTOR, YAMAHA VEGA R SEPEDA MOTOR Tahun 2005, HASIL SENDIRI Rp. 2.500.000
2. MOBIL, TOYOTA RUSH MINIBUS Tahun 2010, HASIL SENDIRI Rp. 90.000.000
3. MOBIL, ETIOS VALCO MINIBUS Tahun 2015, HASIL SENDIRI Rp. 70.000.000



4. MOTOR, VARIO SOLO Tahun 2017, HASIL SENDIRI Rp. 7.000.000
5. MOTOR, HONDA SCOOPY SOLO Tahun 2019, HASIL SENDIRI
Rp. 10.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA	Rp.	70.000.000
D. SURAT BERHARGA	Rp.	----
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	570.354.109
F. HARTA LAINNYA	Rp.	----
Sub Total	Rp.	2.364.854.109
III. HUTANG	Rp.	----
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	2.364.854.109

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.